

DINAMIKA MASYARAKAT MIMIKA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN SOSIAL **(Mimika Community Dynamics of Social Resilience in Perspective)**

Achmadi Jayaputra

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
E-mail: jachmadi@yahoo.co.id

Abstrak

Kabupaten Mimika asalnya dari suatu kecamatan atau distrik Timika. Saat ini secara sosial dan ekonomi berkembang dengan pesat berkat adanya sebuah perusahaan pertambangan internasional. Keberadaan perusahaan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, terutama penduduk asli dan penduduk pendatang. Kedua kelompok masyarakat tersebut masing-masing memiliki ketahanan sosial dalam hidup berdampingan. Kajian bertujuan untuk memahami tentang ketahanan sosial masyarakatnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan pengamatan lapangan dalam kehidupan sehari-hari di kota Timiki. Hasil kajian menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing mempertahankan ketahanan sosial sosialnya. Namun, dalam keadaan tertentu ketahanan sosial masyarakat terasa renggang dan berakibat munculnya perselisihan atau konflik sosial yang bersifat laten. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam masyarakat yang ingin hidup berdampingan dengan cara saling menyesuaikan diri.

Kata kunci; dinamika, masyarakat Mimika, ketahanan sosial

Abstract

Mimika comes from a District Timika. Currently socially and economically growing rapidly because of an international mining company. The company's presence affects the lives of its people, especially the indigenous people and settlers. Both of these groups each have a social security in coexistence. The study aims to understand the social resilience of communities. Data was collected through interviews with community leaders and field observations of everyday life in the Timika District. The result showed in everyday life are each retain their social resilience. However, in certain circumstances the social resilience of communities feels loose and result in the emergence of social discord or conflict is latent. This shows the dynamics in the community who want to live side by side with each other how to adjust.

Keywords: dynamics, Mimika community, social resilience

PENDAHULUAN

Tahun 2004 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) telah melakukan pemetaan daerah tertinggal di Indonesia. Berdasarkan sebaran, ada 199 kabupaten tertinggal dengan rincian; 123 kabupaten atau 61, 81 persen berada di Indonesia Timur, 58 kabupaten atau 29,15

persen di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten atau 9,04 persen berada di Pulau Jawa dan Bali. Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakatnya dan daerahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan dan pegunungan, kepulauan, pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Atau karena faktor geomorfologis lainnya, sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun komunikasi media (Bappenas; 2008: 4)).

Sementara itu, Kementerian Sosial RI melakukan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Lima Puluh Kabupaten Daerah Tertinggal. Pertimbangannya merupakan program prioritas Kementerian Sosial RI sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan keadilan di daerah tertinggal. Oleh karena itu dicantumkan 50 kabupaten tertinggal yang akan digunakan sebagai acuan daerah tertinggal dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kabupaten Mimika yang berada di Provinsi Papua termasuk kabupaten yang dianggap tertinggal karena dilihat dari kondisi masyarakatnya masih banyak yang belum beruntung, tetapi tidak dijelaskan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketertinggalan akan di lihat dari perpektif ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat adalah suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan, ekonomi dan politik. Suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila; *Pertama*, Mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan; *Kedua*, Mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial; *Ketiga*, Mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan tindak kekerasan; *Ketiga*, Mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam dan sumber daya sosial (Anonim; 2006: 16).

Kemampuan komunitas setempat akan di lihat sebagai gambaran awal dalam mengidentifikasi ketahanan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu beberapa permasalahan yang diajukan; bagaimana kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi ketahanan sosial dan apa saja program yang akan dilakukan di kabupaten itu. Tujuannya

untuk mengidentifikasi kondisi ketahanan sosial dan program pengembangan yang diperlukan.

Sumber Data

Kajian ini bersifat analisis deskriptif yang berkaitan dengan kehidupan sosial penduduk masyarakat setempat dan penduduk pendatang. Sumber data melalui; studi kepustakaan, wawancara, pengamatan, dan diskusi kelompok. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan perkumpulan yang ada. Selain itu mengamati kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk formal seperti arisan, pertemuan khusus dan kegiatan ekonomi. Selain itu dilakukan diskusi secara kelompok untuk memudahkan pemilihan data dan informasi. Diskusi kelompok dilakukan di Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika dengan mengundang sebanyak 20 orang yang terdiri dari; pengurus organisasi sosial, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Materi yang dibahas yaitu empat dimensi ketahanan sosial masyarakat, kesejahteraan sosial dan upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan masyarakat.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap ruang lingkup yang dibahas yaitu; geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan sosial.

Gambaran Lokasi

Kabupaten Mimika ibu kotanya di Timika. Luasnya sekitar 21.522,77 Km² atau 4,75 persen dari luas wilayah Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Distrik bertopografi di dataran tinggi yaitu Tembagapura, Agimuga dan Jila. Pegunungan tengah terdiri dari enam rangkaian yaitu; Pegunungan Charles Louis di sebelah utara Sungai Aindua, Pegunungan Yamapoa diantara Sungai Edere dan Sungai Yawee, Pegunungan Hannekam di sebelah timur Sungai Kamoro, Pegunungan Maire di sebelah timur Sungai Mamoia dan Pegunungan Lineaus

di sebelah timur Agimuga. Bagian selatan pegunungan merupakan daerah permukaan dari bergelombang landai hingga daratan yang luas yang langsung dengan Laut Arafuru. Distrik di dataran rendah yang tidak berpantai atau berada di aliran sungai yaitu Mimika Baru dan Kuala Kencana. Sedangkan distrik yang berpantai yaitu; Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Agimuga dan Jita.

Geografis

Secara fisiografi kabupaten ini meliputi lempeng Pegunungan Papua dan daerah berawa. Pegunungan tengah terdiri dari enam rangkaian; Pegunungan Charles Louis di sebelah utara, Pegunungan Yamapoa dan Pegunungan haneken di sebelah timur, Pegunungan Maire di sebelah barat, aliran Sungai Komoro di bagian selatan dengan daratan yang luas.

Sumber daya alam sangat bervariasi meliputi; flora dan fauna, pertambangan, dan wisata. Pertambangan di Gunung Grasberg dan Erstberg yang kaya akan kandungan tembaga dan emas. Wisata alam diantaranya Taman Nasional Lorentz, Danau Paradise, Kota Kuala Kencana. Perhubungan antar daerah hanya melalui laut dan sungai di Pelabuhan Pomako digunakan untuk kepentingan masyarakat dan Pelabuhan Amamapare khusus PTFI. Hubungan udara, Kabupaten Mimika memiliki enam bandar udara. Satu diantaranya andar Udara Internasional Moses Kilangin di Timika.

Demografis

Penduduk berdasarkan tahun 2005, berjumlah 155.147 jiwa, terdiri dari laki-laki 89.946 jiwa atau 57,97 persen dan perempuan 65.201 jiwa atau 42,03 persen. Komposisi penduduk terdiri dari dua kelompok asal yaitu; penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli hanya suku bangsa Komoro yang mendiami daerah pantai dan suku bangsa Amungme yang

mendiami daerah lereng pegunungan tengah. Suku bangsa Kamoro disebut juga sebagai suku bangsa Mimika. Mereka hidup sebagai nelayan pantai dan rawa-rawa, serta berburu dan meramu. Jumlahnya 20.604 jiwa atau 13,28 persen, saat ini masih banyak yang tinggal di pantai Nawaripi dan sebagian tinggal di Kampung Nawaripi Baru yang berada di Distrik Mimika Baru.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah
1.	Amungme	6.113
2.	Mee atau Ekari	5.610
3.	Dani	10.890
4.	Damal	5.029
5.	Nduga	6.057
6.	Moni	1.770
7.	Kamoro	20.604

Sumber; Anonim; 2010: 3

Penduduk pendatang yang terbagi tiga yaitu; penduduk yang berasal dari suku bangsa Papua, beberapa suku bangsa lain di Indonesia, dan suku bangsa asing yang berasal dari manca negara. Jumlah penduduk pendatang selalu bertambah karena arus migrasi spontan, seperti penduduk Papua lainnya 15.823 jiwa atau 10,19 persen dan penduduk non Papua yang berjumlah 15.823 jiwa atau 53,67 persen.

Kedatangan penduduk pendatang menimbulkan beberapa dampak positif. *Pertama*, banyaknya pendatang yang mencari pekerjaan, terutama bagi mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian tertentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Peluang kerja untuk semua sektor sangat terbuka, sehingga tiap orang dapat menentukan keahliannya dan memungkinkan pekerja mendapat gaji besar. *Kedua*, secara umum kehidupan antar penduduk pendatang, penduduk pendatang dengan penduduk setempat berlangsung secara baik. Terutama hidup berdampingan dalam berbagai aspek sosial dan agama yang saling menghormati asal

suku bangsa dan agama. *Ketiga*, banyaknya perkawinan antar suku bangsa baik penduduk setempat dengan penduduk pendatang atau sebaliknya, sesama penduduk pendatang yang berasal dari daerah yang sama atau sesama penduduk pendatang dari daerah yang berbeda. *Keempat*, adanya perkawinan antar umat beragama. Namun banyak terjadi menentukan pilihan upacara agama hanya satu agama saja, sehingga akan terjadi perpindahan agama yang dilakukan oleh penganten laki-laki atau penganten perempuan.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbesar umur 20 - 44 tahun berjumlah 84.268 jiwa atau 53,39 persen. Ini berkaitan dengan usia kerja yang dilakukan penduduk dalam berbagai sektor karena daya serap pekerja sangat tinggi tiap tahun sekitar 19.149 jiwa atau kenaikan atau 13,56 persen. Sedangkan kelompok umur paling kecil umur 65 tahun ke atas hanya berjumlah 852 jiwa atau 0,78 persen. Dari seks ratio di Distrik Tembagapura 553,57, artinya jumlah penduduk laki-laki hampir enam kali dibandingkan dengan penduduk perempuan karena di daerah tersebut sebagian besar pekerjaannya kaum laki-laki yang bekerja di pertambangan (Pemerintah Kabupaten Mimika, 2006; 40 - 42, Anonim; 2009 : 64 - 66).

Penduduk Kabupaten Mimika dapat dirinci berdasarkan penganut agama yang terdiri dari beragama Kristen Protestan 65.916 jiwa atau 42,21 persen, Kristen Katolik 38.399 jiwa atau 24,59 persen, Islam 51.533 jiwa atau persen, Hindu 185 jiwa atau 0,19 persen dan Budha 15 jiwa atau 0,01 persen. Sebagian besar penduduknya beragama Kristen Protestan dan Katolik atau 66,80 persen dan Islam atau 33 persen. Kondisi tersebut menunjukkan penduduk setempat yang beragama Nasrani tersebut, penduduk pendatang kebanyakan beragama Islam. Ini memperlihatkan perkembangan yang baik karena selama ini kehidupan beragama berjalan sesuai dengan ibadah masing-masing.

Pelaksanaan ibadahnya didukung dengan sarana antara lain terdapat 202 Gereja, 40 Masjid dan 62 Musholla, empat Kopel, dan satu Pura (Pemerintah Kabupaten Mimika; 2006: 107 - 108).

Ekonomi

Tahun 1986 beroperasi PT. Freeport Indonesia Inc sebagai cabang dari perusahaan induk di Amerika Serikat, Freeport Mc Moran Inc atau PT. Freeport Mc Moran (PTFM). Menjelang akhir tahun 1991, ketika Kontrak Karya II ditandatangani, PT. Freeport Indonesia Inc berganti menjadi PT. Freeport Indonesia (PTFI). Kabupaten Mimika menjadi kabupaten terkaya di Provinsi Papua. Di atas hutan tropis Papua, tepatnya di Kecamatan Tembagapura, tersembunyi kekayaan mineral yang sangat besar. Potensi bahan tambang di Kecamatan Tembagapura menjadi cadangan terbesar ketiga di dunia. Sedangkan emasnya sendiri menjadi yang terbesar di dunia mencapai 2,6 miliar Ton di areal seluas 202.950 Ha. Masuknya PTFM membuka keterisolasian daerah yang dikelilingi hutan, perairan, dan pegunungan. Infrastruktur terbangun dengan keberadaan kota modern, lapangan terbang, pelabuhan laut, dan fasilitas jalan. Lapangan kerja pun cukup terbuka meski tidak seratus persen menyerap penduduk lokal. Kekuatan perekonomian Mimika sampai saat ini dan tahun-tahun mendatang sepenuhnya bergantung pada pertambangan (Anonim; 2010: 18).

Sosial Budaya

Fakta menunjukkan penduduk terdiri dari penduduk asli atau penduduk setempat dan penduduk pendatang. Penduduk asli terdiri dari dua kelompok besar. *Pertama*, kelompok masyarakat dari daerah pegunungan yaitu suku bangsa Amungme dan lima suku bangsa terdekatnya seperti Mee atau Ekari, Dani, Damal, Duga dan Moni. Tingkah laku dan watak suku bangsa Amungme identik dengan

alam pegunungan (*amung*), sebagai penakluk dan pewaris alam. Kerasnya pegunungan menjadikan mereka keras, tidak mengenal kompromi, *fair* dan *gentlemen* dengan selalu melakukan tindakan preventif dalam semua kegiatannya (Anonim, 2006: 6 - 8).

Kedua, suku bangsa Kamoro sebagai kelompok masyarakat yang tinggal di pantai selatan Papua. Merekalah yang mempunyai hak ulayat atas tanah rawa dan pantai serta aliran sungai di sekitarnya. Mata pencaharian pokoknya berburu dan meramu. Permukiman tidak menetap, sehingga kehidupannya tergantung alam seperti ketersediaan sagu, babi, ikan, udang, kepiting dan lain-lain. Suku bangsa Kamoro merasa berkecil hati ketika mulai mengikuti keberadaan hidup yang semi nomaden, menempatkan populasi agar dapat dihitung, disekolahkan, dikenakan pajak dan dikontrol. Suku bangsa ini selama tiga dekade telah memiliki hubungan dagang terbatas dengan suku bangsa lain yang berasal dari wilayah Indonesia bagian barat seiring dengan keberadaan pemerintah Belanda dan penyebaran agama Nasrani.

Tahun 1926 Distrik Kokonao pemerintahan Belanda menugaskan Bistir pertama yaitu Hambali. Beliau berhasil mendirikan dan mengangkat dua kerajaan di wilayah Mimika yaitu Raja Umar dan Raja Kipiya. Selain itu mengangkat dan melantik beberapa orang dengan sebutan sebagai Nati, Kapitan dan Mandor. Namun dalam beberapa tahun Bistir Hambali menjalankan tugas tersebut, lalu beliau meninggal dunia. Pekerjaannya untuk memperluas wilayah Kesultanan Tidore di daerah ini berakhir juga, sehingga perangkat kerajaan yang diangkat tidak berfungsi lagi.

Perkembangan selanjutnya, tahun 1958 dimulai proyek permukiman dan pengembangan pertanian dengan membuka Pos Pemerintahan yang terdiri dari Pamong Praja, Polisi, mantri kesehatan, bidan, penyuluh pertanian, guru dan

tukang. Alasan pindah ke Timika karena akan memperluas kota Tembagapura di Lembah Waa, dan alasan keamanan akibat konflik antara TNI dengan OPM. Kemudian Kelompok pertama dimulai tahun 1960-an dari Lembah Tsinga dan Noema pindah ke daerah Agimuga. Kelompok kedua dimulai tahun 1973 dari Lembah Waa, Agimuga dan daerah lainnya ke wilayah Timika, terutama di Kwamki Lama dan Kwamki Baru. Kelompok yang masuk ke wilayah Timika dipimpin oleh Yohanes Kapiyau. Perpindahan dilakukan karena faktor alam dan penyakit. Faktor alam tempat tinggal suku bangsa tersebut di pegunungan yang menyulitkan dalam komunikasi dan pembinaan. Munculnya penyakit frambusia (*yaws*) yang menyerang sebagian besar penduduk setempat. Selain itu agar mendapat kemudahan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan perbaikan ekonomi.

Program transmigrasi penempatan pertama tanggal 16 November 1986 di Satuan Permukiman (SP) I dengan jumlah penduduk 156 jiwa. Sekarang menjadi Desa Kamoro Jaya. Setelah itu unit pemukiman transmigrasi terus bertambah menjadi 13 Satuan Permukiman. Mulai tahun 1986 sampai dengan 1999 jumlah penduduk yang masuk dalam program ini keseluruhan mencapai sebanyak 15.794 jiwa. Pembagian kuota penempatan dilakukan dengan cara 80 persen dari daerah asal atau luar daerah dan 20 persen dari penduduk setempat. Kecuali dua satuan permukiman ditempati penduduk setempat yaitu SP 8 Kaugapu ditempati suku bangsa Kamoro, dan SP 12 Utik ini ditempati suku bangsa Dani, Damal, Moni dan Mee atau Ekari.

Kedatangan penduduk pendatang hanya diketahui dari keterangan tokoh masyarakat. Penduduk pendatang diketahui dua kelompok. *Pertama*, masyarakat Indonesia lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta, anggota ABRI dan Polisi, pedagang

dan sebagainya. Kedatangannya berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan penugasan sebagai pegawai negeri untuk instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebagian dari masyarakat Indonesia suku bangsa kehidupan ada yang datang secara spontan karena mengikuti saudaranya atau mencari peluang kerja. *Kedua*, masyarakat pendatang yang berasal dari negara asing. Ada yang sudah menetap sejak lama berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan penyebaran agama Kristen di daerah Papua bagian selatan. Mereka terdiri dari rombongan missionaris dan zending, kebanyakan berasal dari Eropa dengan pekerjaan antara lain; Pendeta, Penginjil, Pekerja Sosial dan sebagainya. Sejak dibukanya pertambangan makin banyak orang asing yang datang dan pergi berkaitan sebagai pekerja di PTFI dan di berbagai perusahaan kontraktornya. Mereka berasal antara lain dari Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina dan sebagainya. Kedatangannya bersifat temporer biasanya berdasarkan ikatan kerja atau kontrak kerja. Pertambahan penduduk asing selalu menunjukkan peningkatan karena jenis pekerjaannya yang memerlukan keahlian khusus dan pertukaran tenaga asing secara bergantian.

Interaksi penduduk asli dan penduduk pendatang hanya berdasarkan kepentingan ekonomi. Seperti suku bangsa Makasar dan Bugis yang bergerak di perdagangan hanya melayani pembelian barang dagangan dari seluruh suku bangsa yang ada. Sedangkan suku bangsa lain kaitannya dengan jenis pekerjaan yang dilakukan karena tidak ada pembagian kerja berdasarkan suku bangsa. Semua mempunyai kesempatan yang sama.

Dahulu suku bangsa Dani berperang dengan antusias dan agresif. Perang sebagai media pengembangan diri dalam kepemimpinan yang dapat mengandung nilai positif dan negatif. Ada dua faktor yang mendorong

perang antar klen yakni adanya *tugi* dan perasaan dendam. *Tugi* dapat mendorong orang untuk mengengang gugurnya seorang anggota konfederasi dan arwah dari anggota tersebut menuntut pembalasan terhadap konfederasi atau pasangan suku musuhnya. Kematian atau tewasnya seorang anggota keluarga dalam peperangan sering meninggalkan jejak dendam yang cukup kuat dan mendalam. Rasa dendam ini cukup kuat mewarnai semangat berperang. Perang merupakan suatu kesempatan untuk memperbesar pengaruh seseorang, bila dapat menunjukkan keberaniannya atau mendemonstrasikan kebolehannya dalam mengatur strategi atau membunuh musuh (Myron Bromly; 1994 : 67).

Perang diawali dengan pertengkaran antar individu dan pembunuhan antar kelompok. Kemudian meluas menjadi pembunuhan antar warga klen-klen kecil dan pembunuhan antar warga gabungan klen lokal yang akhirnya menjadi permusuhan berlarut-larut antara warga dari klen besar dan bahkan antar konfederasi. Penyebab perang antara lain pencurian babi, kawin sumbang, pencurian wanita, tuduhan melakukan sihir, pertikaian hak atas tanah. Perlu dibedakan antara permusuhan yang berlarut-larut dan perang dengan pertempuran (*wim*). Permusuhan yang berlarut-larut bersifat permusuhan tidak resmi yang dapat terjadi antar individu, klen-klen atau gabungan dalam suatu konfederasi. Permusuhan berupa pertengkaran antar gerombolan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya. Biasanya permusuhan yang berlarut-larut lebih banyak korban. Serangan-serangan yang dilakukan seperti terhadap orang-orang yang sedang bekerja di kebun, wanita yang sedang mencari kayu bakar di hutan, rombongan pedagang, dan serangan terhadap perkampungan di malam hari (*dotom*). Permusuhan dapat reda dan terpendam selama beberapa tahun, tetapi dapat juga meluas menjadi peperangan resmi.

Peperangan yang bersifat resmi selalu terjadi antar dua atau beberapa konfederasi. Dilakukan secara terbuka dimulai dengan serangkaian upacara keagamaan di balai perang (*wim aela*) yang berada di satu kampung anggota konfederasi. Pertempuran secara terbuka selalau diadakan di daerah bebas (*wim bolak*) yang berada diantara kedua konfederasi yang bermusuhan dan tidak dikuasai oleh pihak manapun. Pemimpin perang (*wim matek*) yaitu seorang tokoh *kain* yang tinggi. Pasukan saling berhadapan dengan suara gegap gempita dan saling meneriakkan cemoohan atau dengan perkelahian satu lawan satu. Korban yang luka atau meninggal segera disingkirkan dan dirawat di garis belakang. Perang akan berhenti, apabila korban kedua belah pihak kira-kira sama banyaknya atau hari sudah mulai gelap. Penghentian karena kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai. Pertempuran antar konfederasi dapat berlangsung selama lima sampai sepuluh hari (Koentjaraningrat, 1992; 284-289).

Setiap pihak mengadakan pesta yang berlangsung selama beberapa hari dengan melakukan tarian kemenangan (*edat wasin*). Tarian juga untuk menghormati kawan yang baru selesai berperang. Kecuali itu mengadakan upacara untuk menghibur kerabat para korban perang (*ye waganin*). Selama upacara diberikan barang-barang berharga seperti kantung-kantung jaring (*su*), rangkaian kerang-kerang dan batu-batu berharga yang berbentuk pipih dan bulat telur (*ye*). Upacara ini biasanya diadakan bersamaan dengan waktunya dengan pesta babi (*wam oat balin*) untuk memberi penghargaan kepada para perjurit yang telah berjasa dalam pertempuran terbuka atau serang-serangan lain. Berperang telah berakar dalam sistem religi dan merupakan kegiatan suci yang diwajibkan nenek moyang mereka (Koentjaraningrat, 1992; 272 - 274).

Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Perkembangan lebih lanjut, di kabupaten ini tercatat adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat karena sesuatu hal mengalami hambatan, kesulitan atau gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar.

Tabel 2. Permasalahan Kesejahteraan Sosial

No	Jenis	Jiwa
1.	Keluarga fakir miskin	58.752
2.	Penyandang HIV/AIDS	1.430
3.	Tuna susila	357
4.	Penyandang cacat	196
5.	Lanjut usia terlantar	137
6.	Pekerja migrant	35

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mimika

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2009 terdapat 20 jenis PMKS. Enam terbesar diantaranya berkaitan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat karena jumlahnya cukup banyak. Diantaranya masih banyak keluarga fakir miskin yang terdiri dari penduduk setempat bertempat tinggal di daerah pegunungan dan daerah terpencil lainnya. Pelayanan yang dilakukan terbatas pada beberapa PMKS seperti keluarga miskin melalui perbaikan rumah, bantuan modal usaha, dan bantuan bagi wanita rawan sosial. Secara khusus berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor 109 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini dilakukan berkaitan dengan perkembangan kota Timika yang didatangi banyak orang dari berbagai suku bangsa, sehingga dikenal dengan masih banyaknya penyandang HIV/AIDS dan penanggulangan PMKS.

Pelayanan terhadap PMKS diperlukan dalam rangka pelayanan terhadap sebagian masyarakat yang masih memerlukan bantuan.

Walaupun selama ini sudah banyak bantuan yang diberikan, khususnya perusahaan pertambangan internasional yang ada. Menjadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Mimika untuk melakukan pelayanan yang tidak dilayani lembaga sosial dan lembaga swadaya lainnya. Oleh karena itu akan memelihara ketahanan sosial secara khusus berkenaan dengan ketahanan sosial baik penduduk setempat dan penduduk pendatang.

Ketahanan Sosial

Empat aspek ketahanan sosial masyarakat. *Pertama*, Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencakup jenis dengan jumlah yang besar yaitu keluarga rentan, keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana dan fakir miskin. Ketiganya saling berkaitan, terutama terhadap beberapa suku bangsa yang selama ini hidupnya terencil. Perlindungan terhadap PMKS tersebut sudah dimulai dengan memberikan bantuan terhadap mereka seperti bantuan keluarga miskin berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin) yang telah dimulai dari tahun 2006 sampai saat ini. Demikian juga kegiatan penanggulangan bencana alam telah dilakukan dengan cara pemindahan (relokasi) sebagian masyarakat yang berada di daerah aliran sungai dan pantai.

Peran PTFI sangat menonjol antara lain;

1. Secara ekonomi, tahun 2008 secara ekonomi manfaat langsung yang mencapai \$1,2 miliar bagi ekonomi Indonesia masing-masing untuk nasional (1,3 %), Provinsi Papua (40 %) dan Kabupaten Timika (96 %). Manfaat tidak langsung dalam pembangunan sarana seperti pembangkit listrik, bandar udara dan pelabuhan laut, jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah sakit, tempat usaha, pengembangan usaha kecil dan menengah. Kegiatan terhadap masyarakat setempat yaitu pengembangan usaha meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan,

perdagangan, kerajinan tangan dan kegiatan ekonomis produktif lainnya,

2. Kemitraan dalam pengembangan masyarakat dikelola Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM). Lembaga tersebut bekerjasama dengan pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mitra komunitas lain dalam mendukung pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat,
3. Pendidikan dan Pelatihan melalui Institut Pertambangan Nambangkawi memberi kesempatan kepada putra daerah setempat dengan menyediakan peluang program pra-magang, magang dan pengembangan karir. Tahun 2008 lebih dari 1.450 orang yang telah mengikuti program antara lain; pengelasan, mekanik alat berat, pekerjaan listrik dan instrumentasi, administrasi dan sebagainya. Termasuk pengiriman tenaga kerja PTFI untuk belajar ke perguruan tinggi seperti di Institut Teknologi Bandung, Politeknik Negeri Semarang. Sedang dijajagi dengan organisasi pelatihan di Australia;
4. Pengelolaan Lingkungan berkaitan dengan dampak penambangn kegiatannya reklamasi dan penghijauan kembali lahan yang terkena dampak.

Keberadaan PTFI tiap tahun mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya di Distrik Mimika dan Distrik Tembagapura. Di kedua distrik tersebut kegiatan penambangan dan kegiatan pendukung lainnya tiap tahun mengalami peningkatan. Perusahaan pertambangan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak, terutama kegiatan di lobang penggalian tambang dan operasional lapangan.

Kedua, Partisipasi Sosial dalam berorganisasi ditunjukkan dengan banyaknya lembaga sosial atau organisasi sosial dan agama. Kelembagaan sosial atau pranata sosial antara lain;

1. Keagamaan, Kristen Protestan, Kristen Katolik (GKII, GPIB, DGGI, dan lain-lain);

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penganut Islam; dan Advent. Lainnya yaitu Hindu dan Budha tergabung dalam Walubi;
2. Pendidikan terdapat 42 TK, 88 SD, 20 SLTP, delapan SMU dan tujuh SMK;
 3. Kesehatan, ada empat unit rumah sakit, 13 unit Puskesmas, 40 unit Puskesmas Pembantu, dan 37 unit Puskesmas Keliling;
 4. Ekonomi, mulai dari kios, toko, pasar swalayan, pasar tradisional, sembilan bank nasional dan satu bank daerah, 20 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 260 Koperasi lainnya;
 5. Politik, terdapat 14 perwakilan partai politik peserta Pemilu Tahun 2008. Selain itu terdapat lembaga politik yang tidak diakui negara atau dilarang yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mempunyai dua cabang;
 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terbagi dua; pertama berkaitan dengan penduduk setempat seperti LPMK, Lemasko dan Lemasa; kedua yang didirikan penduduk pendatang dengan berbagai nama dan berbagai jenis kegiatan;
 7. Peguyuban atau perkumpulan masyarakat, jumlahnya sangat banyak yang dibentuk penduduk pendatang. Sifatnya informal dengan kegiatan yang berkaitan dengan keperluan masing-masing.

Ketiga, Pengendalian Konflik dengan kondisi sosial politik sangat labil dalam beberapa tahun terakhir ini yang disebabkan heterogenitas penduduk yang sangat tinggi karena latar belakang ekonomi, sosial dan budaya. Ada kecenderungan (Anonim, 2009 : 17 - 19) memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban. Selain itu ada konflik bersifat laten yang disebabkan masalah masa lalu. Konflik yang terjadi hanya di kalangan suku bangsa Amungme dan kerabatnya. Konflik munculnya hanya berkaitan dengan adat dan tuntutan. Suku bangsa yang sering melakukan perang suku yaitu; Amungme, Dani dan Damal.

Permasalahan yang berkaitan dengan adat, dilatar belakangi dengan budaya mereka bahwa perang suku merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang dipelihara terus menerus. Penyebabnya berkaitan dengan sistem perang yang telah diuraikan, sehingga tidak bisa hilang begitu saja sampai saat ini. Sedangkan yang berkaitan dengan tuntutan tentunya berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi antara lain; tuntutan hak atas tanah ulayat dan bantuan. Banyak kasus yang timbul karena hak ulayat penduduk setempat selalu digugat terhadap individu yang berkaitan dengan pembelian tanah, terhadap instansi pemerintah yang telah membeli sebidang tanah dan bangunannya. Selain itu tuntutan yang agak besar dilakukan terhadap PTFI yang dianggap telah mengambil atau merampas hak ulayat yang nyata dan terlihat seperti pengelolaan hutan dan alamnya.

Konflik tersebut lebih sering diselesaikan secara kelompok. Jika berkaitan dengan adat, maka kepala suku atau tokoh masyarakat masing-masing akan menyelesaikannya secara adat pula. Kadang-kadang memerlukan mediasi dari aparat Kepolisian dan pemerintah daerah, sehingga konflik tidak berkepanjangan atau tidak berlanjut. Saat dicapai kesepakatan, tentunya diadakan acara perdamaian yang dilakukan dan disaksikan tokoh masyarakat dan pihak keamanan. Secara resmi lagi dengan perdamaian antar suku bangsa yang melakukan acara bakar batu dan penyediaan hean korban.

Keempat, Pemeliharaan Kearifan Lokal tergantung keberadaan penduduk setempat dan penduduk pendatang. Di kalangan penduduk setempat masih kuat pemeliharaan adatnya yang berkaitan dengan berbagai upacara adat. Sekarang lebih sering dikaitkan dengan peran agama, sehingga tokoh masyarakat dan tokoh agama melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembagian tersebut tergariskan karena tokoh adat yang mengetahui dan melaksanakan aturan adat dalam kemasyarakatan

seperti hak ulayat, perkawinan dan upacara-upacara adat lainnya. Sedangkan tokoh agama melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan kegiatan agamanya, terutama dalam upacara perkawinan dan kematian melalui peran gereja.

Masyarakat pendatang membentuk solidaritasnya berdasarkan kesamaan asal suku bangsa atau asal daerahnya masing-masing. Tiap daerah mempunyai pimpinan informal karena seorang tokoh masyarakat berdasarkan pengakuan misalnya umur lebih tua atau senioritas umur, keahlian dan pendidikan. Ketika masing-masing mengetahui asal usul daerahnya, maka mereka akan membentuk kelompok baru yang sebenarnya dikaitkan dengan daerah asal setingkat kabupaten yang sama atau provinsi yang sama. Keanggotaan bersifat semu karena walaupun dari daerah yang sama tidak ada paksaan untuk menjadi anggota kelompok atau perkumpulan. Masing-masing daerah masih mempertahankan cirri suku bangsanya, terutama dalam penggunaan bahasa daerah asal secara intensif, membentuk kelompok arisan, menggunakan pakaian pengantin daerah dan memberi nama sesuai dengan kebiasaan daerah asal.

Kehidupan penduduk Timika majemuk ditandai dengan beraneka ragamnya penduduk yang mendiami kota tersebut. Akan terlihat saat mereka menyatukan diri dalam suasana tertentu seperti pertemuan kelompok, arisan, perkawinan dan kematian. Kehidupan antar penduduk masih menunjukkan kesepahaman atau harmonis, walaupun ada berbagai perbedaan yang dimiliki. Satu hal sangat baik yaitu semakin banyaknya penduduk yang melakukan perkawinan antar suku bangsa. Baik antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang, maupun antara sesama penduduk pendatang. Selain itu banyak juga perpindahan penganut agama, terutama bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan keyakinan. Biasanya ada pasangan yang mengalah, sehingga perkawinan

yang dilakukan dalam satu agama yang sama. Bisa saja calon penganten laki-laki atau calon penganten perempuan berpindah agama untuk menyesuaikan agama yang dan pasangannya. Dengan demikian sering terjadi perkawinan yang disyahkan oleh tokoh agama atau pimpinan agama dalam satu agama yang sama.

Diketahui antara lain dari;

1. Sulawesi; Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) anggotanya terdiri dari orang Bugis, Makassar, dan Mandar, Kerukunan Keluarga Toraja, Ikatan Keluarga Sulawesi Utara, dan Kerukunan Keluarga Manado;
2. Jawa berjumlah sekitar 18 perkumpulan berdasarkan kota asalnya di Jawa seperti Ikatan Keluarga Jawa Timika (Ikajati), Ikatan Keluarga Yogyakarta, Ikatan Keluarga Lamongan, Arisan Banyuwangi, Ikatan Keluarga Asal Jawa Timur, Kerukunan Keluarga Pasundan, Ikatan Keluarga Madura, dan lain-lain;
3. Maluku; Kerukunan Keluarga Ambon dan Ikatan Keluarga Kei;
4. Sumatera; Ikatan Batak Muslim dan Keluarga Batak Papua, dan Ikatan Keluarga Minang;
5. Flores; Ikatan Keluarga Flores.

Tahun 1996 - 1999 dibentuk lembaga kemasyarakatan dengan nama Pengembangan Wilayah Timika Terpadu (PWT2), 1999 – 2002 diganti Pengelolaan Dana Kemitraan atau Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJD). Setelah kedua lembaga tersebut dibubarkan, maka dibentuk menjadi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang disyahkan tanggal 18 Oktober 2002. Lembaga ini meneruskan program-program lembaga yang sudah dirintis terdahulu dengan tiga program utama yaitu; kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengurusnya terdiri dari berbagai unsur yang merupakan perwakilan dari; PTFI, Pemerintah Provinsi Papua,

Pemerintah Kabupaten Mimika, lembaga agama Kristen dan tokoh masyarakat dari dua suku bangsa setempat. Lembaga ini mendapatkan dana dari PTFI sebagai bagian dana kemitraan perusahaan tersebut sebesar satu persen.

Selain itu memberikan dukungan dana kepada dua lembaga adat yaitu Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), lembaga gereja dan bantuan khusus lainnya. Program yang dilakukan antara lain; kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi rakyat, dan program khusus (Anonim; 2008).

KESIMPULAN

Berkaitan dengan hal tersebut diperoleh kesimpulan. *Pertama*, menurut pendapat tokoh masyarakat setempat Kabupaten Mimika tidak layak sebagai kabupaten tertinggal. Walaupun memang secara geografis wilayahnya yang luas, sehingga ketertinggalannya disebabkan daerah yang terlalu luas dan penduduk di pegunungan tidak memperoleh akses ekonomi yang baik.

Kedua, ketahanan sosial masyarakatnya. Masing-masing penduduk asli dan penduduk pendatang mempertahankan nilai-nilai budayanya sebagai bentuk ketahanan sosial yang dimiliki. Terutama dikaitkan dengan pemeliharaan kearifan lokal lima suku bangsa masih mempertahankan kehidupan budayanya seperti kelompok permukiman, memelihara fungsi kekerabatan dan perang suku. Sedangkan masyarakat pendatang ketahanan sosialnya dalam dua dimensi yaitu; dimensi perlindungan sosial terhadap diri dan masyarakatnya dengan melakukan kegiatan perdagangan dan pekerjaan; dimensi pemeliharaan konflik dengan membuka diri terhadap penduduk setempat dan dengan cara bergaul secara intensif dengan sesama daerah asal dan membentuk organisasi sosial kedaerahan.

Ketiga, program pengembangan masyarakat terhadap masyarakat setempat dilakukan pemerintah daerah dan satu lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan yang dilakukan telah memberi arti yang penting bagi masyarakat dalam mengejar ketertinggalannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2008). *Laporan Tahunan 2008. Berkarya Menuju Pengembangan Masyarakat Berkelanjutan*. Timika; LPMK.
-, (2008). *Institut Pertambangan Nemangkawi*. Jakarta; Freeport Indonesia.
-, (2009). *Profil Organisasi Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro*. Timika; LPMK.
-, 2010. *Profil Dinas Sosial Kabupaten Mimika*. Timika; Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
- Bromly, Myron, (1994). "Dasar Kehidupan: Sedikit Mengenai Religi di Balim Selatan" dalam *Kebudayaan Jayawijaya dalam Pembangunan Bangsa* (Editor: Astrid S Susanto-Sunario). Jakarta; Sinar Harapan.
- Koentjaraningrat, (1986). "Kebudayaan Dani" dalam *Pengantar Antropologi Sosial Budaya* (Koentjaraningrat, editor). Jakarta; Karunika.
-, (1992). "Konfederasi Perang dan Pemimpin dalam Masyarakat Dani" dalam *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Koentjaraningrat, Editor), hal 258 - 296.

- Pemerintah Kabupaten Mimika dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, (2006). *Mimika Dalam Angka 2006/2007*. Timika; BPPDKM dan BPSKM.
- Pemerintah Kabupaten Mimika, (2006). *Mimika Dalam Tiga Dimensi Waktu*. Timika; BPPDKM.
-, (2008). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika*. Timika; BPPDKM.
-, (2009a). *Profil Kabupaten Mimika 2009*. Timika; BPPDKM.
-, (2009b). *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika 2009 - 2013*. Timika; BPPDKM.
-, (2009c). *Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mimika 2009 - 2013*. Timika; BPPDKM.